



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JONI SARJONO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **405941**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 568.246.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/50 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.294.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/60 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 71.952.000
3. Tanah Seluas 224 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/40 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 130 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 298.000.000**

1. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, SUZUKI ADDRESS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 5.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	279.602.840
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.150.848.840
III. HUTANG	Rp.	397.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	753.848.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.